



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telepon (0717) 434693, 4262686 Pangkalpinang 33418 email: inspektoratbabel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehinggadapat menyelesaikan penyusunan rencana perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini sesuai dengan *cascading* Inspektorat dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya rencana Renja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Pada akhirnya semoga Renja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini tetap akan dapat mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, beserta seluruh aspek yang berkaitan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, ditengah akselerasi dinamika perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat cepat dan kompleks.

Pangkalpinang, April 2022

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196306121985031001

D A F T A R I S I

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1.Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2.Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3.Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4.Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 10 |
| 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 10 |
| 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah..... | 52 |
| 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah..... | 54 |
| 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 55 |
| 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 79 |
| BAB III PERANGKAT DAERAH..... | 83 |
| 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 83 |
| 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah..... | 86 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 86 |
| 4.1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... | 86 |
| BAB V PENUTUP..... | 98 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|--|----|
| Tabel T-C.29 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 12 |
| Tabel T-C.30 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 53 |
| Tabel T-C.31 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 56 |
| Tabel T-C.32 | Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 80 |
| Tabel T-C.33 | Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023..... | 85 |
| Tabel T-C.34 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... | 91 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, khususnya dalam bidang pengawasan maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan pelaksanaan tahun keempat Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Renja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Dalam Negeri dan dipadukan dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam membantu tugas Gubernur di bidang pengawasan, sebagaimana Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 7 seri E). Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Tugas-tugas pendukung dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakannya memiliki peran strategi dan signifikan dalam menciptakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas, bersih, responsif dan profesional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah Inspektorat dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sebagai Perencanaan Kerja Jangka Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2023 yang terukur jelas sebagai dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Secara keseluruhan proses penyusunan Renja meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Perumusan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RENSTRA perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahunberkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

- o. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud dukungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi dokumen pendukung pelaksanaan program pembangunan tahun pertama pada Rencana Strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyusunan program kegiatan berbasis kinerja.
- b. Secara umum mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan mengacu pada program yang akan dilaksanakan perangkat daerah (*money follow program*), bukan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah (*money follow function*) guna mencapai target program/kegiatan yang sudah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

- a. Mengakomodir strategi perencanaan pembangunan untuk pendanaan program prioritas Nasional dan Program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinergikan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan program unggulan pembangunan prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah pada RKPD 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja Utama yang sudah ditentukan dalam NSPK dan RPJMD serta Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sampai dengan tahun 2022 dan hasil capaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022 yang telah direalisasikan melalui penetapan program/kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan mengakomodir program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan, dengan jumlah program yang dilaksanakan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) program dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

Penyusunan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan pedoman tersebut, Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) Program,

yang terdiri atas 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program pembangunan strategis.

3 (tiga) program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang merupakan program rutin yang dilaksanakan secara tahunan dan terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan; Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan; serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan.

Tabel berikut akan menyajikan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TabelT-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

[illegible]

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 14 dokumen | | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi | 14 dokumen | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja Perangkat | 7 Dokumen | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Perencanaan Perangkat Daerah | Daerah | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 7 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan | 85% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Prov Kep BaBel | 12 Bulan (90 Pegawai) | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 orang | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | dan Fungsi | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 85% | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 bulan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang | 12 bulan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Tersedia | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 bulan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 12 bulan | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 3 jenis | | | | | | | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedia | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Listrik, Telepon, Internet yang dibayarkan | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 12 bulan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia | 12 bulan | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100% | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | 12 bulan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedia | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya Terpelihara | 12 bulan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Kantor dan bangunan lainnya | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN | Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya | 4% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 4% | | | | | | | |
| | | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 4% | | | | | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi audit | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | |
| | | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi audit review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase Obyek Pemeriksaan yang | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | dilakukan pengawasan internal meliputi audit review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan atas Pengawasan Kinerja Pemerintah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 12 Laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan atas Pengawasan Kinerja Pmerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 12 Laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan atas | 12 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Pengawasan Kinerja Pmerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 11 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 11 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 11 laporan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan | 1 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Kinerja yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 1 Laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan Bidang Pengelolaan | 1 Laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan | Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya | 1 Laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 1 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 laporan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang | 2 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | dihasilkan bidang Pembangunan, Sosial, ekonomi dan Budaya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan bidang Pemerintahan dan Aparatur | 2 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+ 9) | 11=(104) |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi, dan Budaya | 9 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Bidang | 9 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Pemerintahan dan Aparatur | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 9 laporan | | | | | | | |
| | | Kegiatan PenyelenggaraanPen gawasanDenganTuju anTertentu | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. | 100% | | | | | | |
| | | Persentase | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya. | | | | | | | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur. | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase Terselenggaranya Pengawasan dengan | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Tujuan Tertentu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. | | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu meliputi Audit Khusus dan Kasus | 100% | | | | | | |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 3 Nilai | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+ 9) | 11=(104) |
| | | | | | | | | | | |
| | | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pencegahan dan Investigasi | 3 nilai | | | | | | | |
| | | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah | 3 nilai | | | | | | | |
| | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 100% | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 100% | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya | 5 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pemerintahan dan aparatur | 5 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pencegahan dan investigasi | 5 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pengelolaan keuangan | 5 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | dan aset daerah | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 5 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 5 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | | Jumlah laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pencegahan dan Investigasi | 5 laporan | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5 laporan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pendampingan, | Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 7 laporan | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) | PerkiraanRealisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(104) |
| | Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tugas pokok yang dititik beratkan pada sasaran dan program strategisnya dengan indikator masing-masing. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel analisis dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Indikator | SPM/Standar | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-------------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|-------|----------|--------|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | 39,42 | 45,00 | 55,00 | | 0.00 | 39.42 | 134,13 | 114,84 | |
| 2 | Persentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai kategori (B) | | | 20,00 | 25,00 | 45,00 | 65,00 | | 100 | 100 | 60.36 | 63.16 | |
| 3 | Persentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasan APIP pada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | | | 93,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | | 92.83 | 92,83 | 93.61 | 91,63 | |
| 4 | Persentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti | | | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 96,00 | | 89.56 | 88,47 | 89.96 | 88,83 | |
| 5 | Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Perubahan system manajemen pemerintahan daerah dan perubahan system pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku APIP. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya Sistem Pengawasan Intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan berdasarkan prinsip *good governance*.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis ditetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat;
2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP;
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
4. Tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP;
5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan terformulasinya isu-isu tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan data rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

TabelT-C.31.
Review TerhadapRancanganAwal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Pangkalpinang | Nilai Sakip PD | 80 | 15.509.681 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pangkalpinang | Nilai Sakip PD | 82 Nilai | 20.306.537 | |
| 1.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 10 | 9.512 | | | Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Inspektorat) | 90% | 272.000 | |
| | | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 14 dokumen | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD | 2 dokumen | 7.303 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi | 14 dokumen | 80.000 | |
| 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah RKA/DPA yang tersusun | 4 Dokumen | 2.208 | Sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 40.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|---|----------------------|---|-----------------|-------------------------|--|----------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Survey kepuasan pelayan keuangan | 95 | 13.641.887 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 7 dokumen | 17.672.000 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pangkalpinang | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan | 88 | 13.641.887 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pangkalpinang | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan | 85% | 17.640.000 | |
| 1.5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 orang | 152.745 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Prov Kep BaBel | | 13.084.317 | |
| 1.5.9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pangkalpinang | | | 152.745 | | | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pangkalpinang | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 orang | | |
| 1.3 | Administrasi Umum | Pangkalpinang | Survey kepuasan pelayan internal | 95 | 2.605.550 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pangkalpinang | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 85% | 2.242.537 | |
| 1.3.1 | Penyediaan Jasa surat menyurat | Pangkalpinang | Jumlah Surat/Barang yang dikirim | 12 | 20.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Pangkalpinang | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 12 bulan | 16.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|---|---------------|--|----------------|-------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Jumlah Materai | 1.600 | 9.300 | Bangunan Kantor | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pangkalpinang | Jumlah tagihan listrik | 12 | 156.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pangkalpinang | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 bulan | 170.337 | |
| | | | Jumlah tagihan komunikasi | 12 | 60.000 | | | | | | |
| 1.3.3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Pangkalpinang | jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 45 | 50.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pangkalpinang | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | 12 bulan | 40.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pangkalpinang | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia | 12 bulan | 150.800 | |
| 1.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Pangkalpinang | Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (orang) | 19 | 37.050 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | Pangkalpinang | Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang Tersedia | 12 bulan | | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan ketenagakerjaan (orang) | 19 | 22.800 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pangkalpinang | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 12 bulan | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|---|---------------|---|----------------|-------------------------|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Pangkalpinang | Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor (orang) | 4 | 150.800 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | Pangkalpinang | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 bulan | | |
| 1.3.4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Pangkalpinang | Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara | 4 | 15.000 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Pangkalpinang | Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia | 12 bulan | 12.000 | |
| | | | Jumlah tenaga sopir | 2 | 75.400 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pangkalpinang | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 12 bulan | 37.700 | |
| 1.3.5 | Penyediaan jasa Administrasi keuangan | Pangkalpinang | Jumlah pengelola administrasi keuangan | 8 | 55.250 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pangkalpinang | Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana | 100% | 44.200 | PA, KPA, PPK, Bendahara, Pengurus Barangdll |
| | | | Jumlah Pramubakti | 6 | 226.200 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pangkalpinang | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 3 jenis | | |
| 1.3.6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pangkalpinang | Jumlah tenaga kebersihan | 7 | 263.900 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pangkalpinang | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedia | 100% | 263.900 | |
| | | | Jumlah jenis bahan dan | 35 | 50.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Pangkalpinang | Jumlah | 12 bulan | 40.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|--------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Peralatan kebersihan kantor | | | Surat Menyurat | | Surat/Barang yang dikirim | | | |
| 1.3.7 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Pangkalpinang | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 79 | 50.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pangkalpinang | Tagihan Listrik, Telepon, Internet yang dibayarkan | 12 bulan | 40.000 | |
| 1.3.8 | Penyediaan alat tulis kantor | Pangkalpinang | jumlah jenis ATK yang dibeli | 85 | 120.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pangkalpinang | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 12 bulan | 80.000 | |
| 1.3.9 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Pangkalpinang | jumlah barang cetak | 13 | 50.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pangkalpinang | Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia | 12 bulan | 50.000 | |
| | | | Jumlah penggandaan | 15.000 | 5.250 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | Pangkalpinang | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara | 100% | 5.250 | |
| 1.3.10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pangkalpinang | Jumlah komponen instalasi listrik | 30 | 20.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pangkalpinang | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedia | 12 bulan | 16.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|--------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|---|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.11 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pangkalpinang | Jumlah Jenis peralatan kantor | 40 | 200.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pangkalpinang | Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara | 12 bulan | 80.000 | |
| 1.3.12 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Pangkalpinang | Jumlah peralatan rumah tangga | 1 | 2.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | Pangkalpinang | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya Terpelihara | 12 bulan | 2.000 | |
| 1.3.13 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pangkalpinang | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan | 5 | 20.000 | PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN | Pangkalpinang | Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | 100% | 16.000 | |
| 1.3.14 | Penyediaan makan dan minum | Pangkalpinang | Jumlah makan dan minum Tamu | 36 | 62.400 | | | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya | 4% | 49.920 | |
| | | | Jumlah makan dan minum rapat | 48 | 105.000 | | | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 4% | 64.000 | |
| 1.3.15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Pangkalpinang | Jumlah koordinasi dan konsultasi luardaerah | 36 | 400.000 | | | Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengelolaan | 4% | 280.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|--------|--------------------------------------|---------------|---|----------------|-------------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Keuangan Dan Aset Daerah | | | |
| | | | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 36 | 100.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pangkalpinang | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi audit review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 100% | 80.000 | |
| 1.3.16 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pangkalpinang | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor | 14 | 50.000 | Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pangkalpinang | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi audit review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 100% | 40.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|--------|--|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---|---------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.17 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pangkalpinang | Jumlah peralatan gedung kantor | 12 | 25.000 | | | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi audit review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 100% | 20.000 | |
| 1.3.18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pangkalpinang | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 12 | 150.000 | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pangkalpinang | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan atas Pengawasan Kinerja Pemerintah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 12 Laporan | 80.000 | |
| 1.3.19 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Pangkalpinang | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | 12 | 30.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | 12 Laporan | 24.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|--------|---|---------------|---|----------------|-------------------------|---|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | (LHP) yang dihasilkan atas Pengawasan Kinerja Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur | | | |
| 1.3.20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional | Pangkalpinang | Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara | 36 | 40.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan atas Pengawasan Kinerja Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 12 laporan | 92.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah BBM kendaraan | 84 | 75.000 | | | Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | |
| 1.3.21 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung | Pangkalpinang | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 60 | 100.000 | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan | Pangkalpinang | Jumlah LHP atas Pengawasan | 11 laporan | 40.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|--------|--|----------------------|--|----------------|-------------------------|---|----------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | kantor | | yang dipelihara | | | | | Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | | | |
| 1.3.22 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pangkalpinang | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 36 | 135.936 | | | Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 11 laporan | 60.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah BBM Genset | 12 | 7.200 | | | Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 11 laporan | 7.200 | |
| 1.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Pangkalpinang | Survey kepuasan pelayanan kepegawaian | 95 | 200.000 | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | Pangkalpinang | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 1 laporan | 191.850 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---|--|----------------|-------------------------|---|--------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1 | Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik | Pangkalpinang | Pendidikan dan pelatihan formal | 88 | 200.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 1 Laporan | 120.000 | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 Laporan | 71.850 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, PangkalpinangD KI Jakarta | Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan | <5% | 4.500.000 | | | Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya | 1 Laporan | 4.500.000 | |
| 2.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, PangkalpinangD KI Jakarta | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan | | | | | Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 1 laporan | 1.280.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|-------------------------------|---|---|----------------|-------------------------|--|--|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Keuangan) | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Audit Kinerja dan Keuangan | | | | | | | Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 laporan | | |
| | | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 40 Laporan | 525.000 | Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan bidang Pembangunan, Sosial, ekonomi dan Budaya | 2 laporan | 120.000 | |
| | | DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 40 Laporan | 550.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan bidang Pemerintahan dan Aparatur | 2 laporan | 136.000 | |
| | | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 40 Laporan | 525.000 | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 laporan | 120.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|-------------------------------|---------------|---|----------------|-------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.2 | Review Kinerja dan Keuangan | | | | 900.000 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkalpinang | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi, dan Budaya | 9 laporan | 480.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah LHR yang dihasilkanBidang Pemerintahan dan Aparatur | 34 laporan | 300.000 | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 9 laporan | 120.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah LHR yang dihasilkanBidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 34 laporan | 300.000 | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 9 laporan | 120.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah LHR yang dihasilkanBidang | 34 laporan | 300.000 | Kegiatan PenyelenggaraanPengawasanDenganTuj | Pangkalpinang | Persentase Penyelesaian Pengaduan | 100% | 120.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--------------------------------|---------------|--|----------------|-------------------------|--|---|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | g Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | | | uanTertentu | | Masyarakat. | | | |
| 2.1.3 | PemantauanKinerja dan Keuangan | | | | 625.000 | Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang | Persentase Terselenggaraan ya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya. | 100% | 484.000 | |
| | | Pangkalpinang | JumlahLaporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 20 Laporan | 200.000 | | | Persentase Terselenggaraan ya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur. | 100% | 120.000 | |
| | | Pangkalpinang | JumlahLaporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 20 Laporan | 225.000 | | | Persentase Terselenggaraan ya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. | 100% | 124.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah Laporan | 20 | 200.000 | | | | 100% | 120.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|-------------------------------|---------------|---|----------------|-------------------------|--|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | Laporan | | | | Persentase Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu meliputi Audit Khusus dan Kasus | | | |
| 2.1.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | | | | 300.000 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pangkalpinang | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 3 Nilai | | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 12 Laporan | 100.000 | | | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pencegahan dan Investigasi | 3 nilai | 60.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 13 Laporan | 100.000 | | | Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah | 3 nilai | 60.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi | 13 Laporan | 100.000 | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi | Pangkalpinang | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan Bidang | 100% | 60.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---|---|----------------|-------------------------|--|---|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | dan Budaya | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | | | |
| 2.2 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkalpinang | Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi Audit Kinerja dan Keuangan | 100% | 400.000 | Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkalpinang | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 100% | 200.000 | |
| 2.2.1 | Audit Kinerja dan Keuangan | DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkalpinang | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif | 100% | 200.000 | | | Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 100% | 100.000 | |
| | | DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkalpinang | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif | 100% | 200.000 | | | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya | 5 laporan | 100.000 | |
| 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pangkalpinang | Level Capaian Maturitas SPIP | 3 | 425.000 | | | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pemerintahan dan aparatur | 5 laporan | 240.000 | |
| 3.1 | Perumusan Kebijakan Teknis Di | Pangkalpinang | Persentase Kebijakan | 100% | 100.000 | | | Jumlah laporan | 5 laporan | 80.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan | | | | | pendampingan dan asistensi bidang pencegahan dan investigasi | | | |
| 3.1.1 | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 2 dokumen | 25.000 | | | Jumlah laporan pendampingan dan asistensi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah | 5 laporan | 20.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2 dokumen | 25.000 | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pangkalpiannng | Jumlah laporan pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | 5 laporan | 20.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang | 2 dokumen | 25.000 | | | Jumlah laporan pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 5 laporan | 20.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | | | | | Bidang Pemerintahan dan Aparatur | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif | 2 dokumen | 25.000 | | | Jumlah laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pencegahan dan Investigasi | 5 laporan | 20.000 | |
| 3.1.2 | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur | 2dokumen | 50.000 | | | Jumlah laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 5 laporan | 20.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2 dokumen | 50.000 | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | pangkalpinang | Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 7 laporan | 20.000 | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di | 2 dokumen | 50.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan) | | | | | Catatan Penting |
|-------|------------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|---|--------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya | | | | | | | | |
| | | Pangkalpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif | 2 dokumen | 175.000 | | | | | | |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12) | 6 | | | | | | | |
| 3.2 | Asistensi dan Pendampingan | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, DKI Jakarta, Pangkalpinang | Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan | 100% | 985.000 | | | | | | |
| 3.2.1 | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, DKI Jakarta, Pangkalpinang | Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti | 100% | 200.000 | | | | | | |
| 3.2.2 | Asistensi dan Pendampingan | Pangkalpinang | Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN | 100% | 100.000 | | | | | | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum, terkecuali jika ada pengaduan dari masyarakat yang harus mendapat perhatian dan tindakan lebih lanjut atas perintah Gubernur.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 Inspektorat Daerah dilakukan tahapan forum/rapat koordinasi teknis Perangkat Daerah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi *Zoom Meeting*, dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19. Segala usulan program/kegiatan dari seluruh pihak dapat disampaikan dan dibahas melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain dalam kegiatan Forum Gabungan/ Rakortek/ Forum Konsultasi Publik/ Pramusrenbang/ Musrenbang. Adapun usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang menjadi bahan pembahasan Renja tahun 2023, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel T-C.32.
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|---|------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan :Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Reviu Laporan Kinerja | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Reviu Laporan Keuangan | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Prov.Kep. Babel | | | |
| | | | | | |
| 2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi | | | | |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan | Prov.Kep. Babel | | | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|---|------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pemberantasan Korupsi | | | | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Prov.Kep. Babel | | | |
| | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Sosialisasi Perundang-undangan | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis Inspektorat Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Prov.Kep. Babel | | | |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pengadaan Meubleair | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Prov.Kep. Babel | | | |
| | Kegiatan : Penilaian SAKIP PD | Prov.Kep. Babel | | | |

BAB III

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah diamanatkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Program Prioritas RPJMN 2019-2024 yaitu melanjutkan pembangunan Infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Sehubungan dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2022 difokuskan untuk **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** karena Rencana Strategis Provinsi 2023-2026 akan memfokuskan pada pelaksanaan tatanan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yaitu **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih”** dan **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel”**.

Tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan ekspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Oleh karena itu menjadi tugas penting Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan.

Sistem pemerintahan yang akuntabel berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel maka secara otomatis dapat menaikkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya Level Capaian Maturitas SPIP.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan diatas menjadi dasar rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.33
Rencana Kinerja Tahunan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

| Tujuan: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | |
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih | Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5% | | < 3% |
| 2 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel | Level Capaian Maturitas SPIP | | |
| | | Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12) | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dimana sasaran utama dalam Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan, Capaian Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%, serta level capaian maturitas SPIP. Kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 sejalan dengan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimana dalam proses perubahan tersebut, dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 juga mengalami penyesuaian.

Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, 12 (dua belas) kegiatan dan sebanyak 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada penyusunan rancangan awal dan rancangan Renja telah disesuaikan pagu dengan rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

dengan total kebutuhan anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebesar Rp 21.154.059.653,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi perundang-undangan
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Inspektorat Daerah
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Meubleair
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

h) Kegiatan Penilaian SAKIP PD

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b) Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi

Sub Kegiatan:

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pandemik nasional COVID-19 yang telah terjadi sejak akhir tahun 2019 mengubah tatanan kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya pada perencanaan penganggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini kemudian diikuti dengan langkah tegas pemerintah mengeluarkan instruksi bagi seluruh Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan *refocussing*/re-alokasi anggaran tahun berjalan (tahun 2021) sebagai upaya penanganan Covid-19 dan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Program penanganan dan pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19 ini akan terus berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini secara otomatis berdampak pada penyesuaian pagu indikatif seluruh perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap pagu anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk perencanaan pendanaan (penganggaran) tahun 2023. Perencanaan maju untuk penganggaran tahun 2024 tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang seharusnya, namun apabila dalam pelaksanaannya akan dilakukan *refocussing*/re-alokasi maka Inspektorat Daerah akan tetap melakukan penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut terkait hal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.35. di bawah ini.

Tabel T-C.34.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | 3.521.464,161 | | | | 3.697.537,369 |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | Pangkal Pinang | | 3.089.464,161 | APBD | | | 3.244.189,369 |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pangkal Pinang | 7 Laporan | 726.686,161 | APBD | | 7 Laporan | 763.020,649 |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pangkal Pinang | 7 Laporan | 629.620 | APBD | | 7 Laporan | 661.101 |
| | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Pangkal Pinang | 34 Laporan | 300.400. | APBD | | 34 Laporan | 315.420 |
| | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Pangkal Pinang | 34 Laporan | 312.200 | APBD | | 34 Laporan | 327.810 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota | Pangkal Pinang | 11 Laporan | 305.050 | APBD | | 11 Laporan | 318.202,5 |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk | Pangkal Pinang | 4 Laporan | 200.000 | APBD | | 4 Laporan | 210.000 |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil | Pangkal Pinang | 85 Laporan | 617.748 | APBD | | 87 Laporan | 648.635,4 |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | Pangkal Pinang | | 431.760 | APBD | | | 453.348 |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Pangkal Pinang | 4 Laporan | 188.200 | APBD | | 5 Laporan | 197.610 |
| | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pangkal Pinang | 6 Laporan | 243.560 | APBD | | 7 Laporan | 255.738 |
| | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | Pangkal Pinang | | 798.322,961 | APBD | | | 838.239,109 |
| | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan. | | Pangkal Pinang | | 134.705,924 | APBD | | | 141.441,22 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun. | Pangkal Pinang | 4 Rekom | 12.557,917 | APBD | | 4 Rekom | 13.185,813 |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun. | Pangkal Pinang | 6 Rekom | 122.148,007 | APBD | | 6 Rekom | 128.255,407 |
| | Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi | | Pangkal Pinang | | 663.617,037 | APBD | | | 696.797,889 |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pangkal Pinang | 34 PD | 433.400 | APBD | | 34 PD | 455.070 |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pangkal Pinang | 34 PD | 93.190 | APBD | | 34 PD | 97.849,5 |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Pangkal Pinang | 4 Keg | 36.791,037 | APBD | | 6 Keg | 38.630,589 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pangkal Pinang | 4 Keg | 100.236 | APBD | | 4 Keg | 105.247,8 |
| | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | | Pangkal Pinang | | 18.034.272.531 | APBD | | | 19.324.053,658 |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Pangkal Pinang | | 17.755.928 | APBD | | | 18.643,724 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pangkal Pinang | 7 Dok | 7.303,936 | APBD | | 7 Dok | 7.669,133 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pangkal Pinang | 3 Dok | 10.451,992 | APBD | | 3 Dok | 10.974,592 |
| | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Pangkal Pinang | | 15.065.076,556 | APBD | | | 15.818.322,484 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan | Pangkal Pinang | 90 Orang | 15.050.929,656 | APBD | | 90 Orang | 15.803.746,139 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran | Pangkal Pinang | 4 Laporan | 14.149,9 | APBD | | 4 Laporan | 14.856,345 |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Pangkal Pinang | | 386.110 | APBD | | | 269.598 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsi | Pangkal Pinang | 20 Orang | 161.760 | APBD | | 20 Orang | 169.848 |
| | Sosialisasi Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang - undangan | Pangkal Pinang | 90 Orang | 95.000 | APBD | | 90 Orang | 99.750 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Pangkal Pinang | 1 Paket | 129.350 | APBD | | 1 Paket | 0 |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Pangkal Pinang | | 681.634,622 | APBD | | | 715.779,363 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan | Pangkal Pinang | 15 Jenis | 15.955,146 | APBD | | 15 Jenis | 16.752,903 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Pangkal Pinang | 10 jenis | 79.998 | APBD | | 10 jenis | 83.997,9 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Pangkal Pinang | 2 jenis | 1.924 | APBD | | 2 jenis | 2.020,2 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Pangkal Pinang | 8 jenis | 25.000 | APBD | | 8 jenis | 26.250 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Pangkal Pinang | 10 jenis | 33.249,867 | APBD | | 10 jenis | 34.912,36 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Pangkal Pinang | 4 jenis | 15.500 | APBD | | 4 jenis | 16.380 |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Material yang disediakan | Pangkal Pinang | 15 jenis | 119.915,609 | APBD | | 15 jenis | 125.911,389 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pangkal Pinang | 12 jenis | 113.920 | APBD | | 12 jenis | 119.616 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pangkal Pinang | 13 jenis | 221.132 | APBD | | 13 jenis | 232.188,6 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Inspektorat Daerah | Pangkal Pinang | 1 jenis | 55.000 | APBD | | 1 jenis | 57.750 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Pangkal Pinang | | 445.676,761 | APBD | | | 1.027.660,599 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | Pangkal Pinang | 2 Paket | 209.676,761 | APBD | | 2 Paket | 220.160,599 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Pangkal Pinang | 0 Paket | 0 | APBD | | 1 Paket | 500.000 |
| | Pengadaan Meubleair | Jumlah Paket Meubleair yang disediakan | Pangkal Pinang | 2 Paket | 86.000 | APBD | | 2 Paket | 150.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pangkal Pinang | 5 paket | 150.000 | | | 5 paket | 157.500 |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Pangkal Pinang | | 989.954,364 | APBD | | | 1.003.637,082 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pangkal Pinang | 12 Laporan | 23.337,5 | APBD | | 12 Laporan | 24.205 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pangkal Pinang | 12 Laporan | 174.000 | APBD | | 12 Laporan | 182.700 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (000) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pangkal Pinang | 12 Laporan | 76.316,864 | APBD | | 12 Laporan | 80.132,707 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pangkal Pinang | 12 Laporan | 716.300 | APBD | | 12 Laporan | 716.300 |
| | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Pangkal Pinang | | 383.002,3 | APBD | | | 402.152,415 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak | Pangkal Pinang | 4 Unit | 58.732,3 | APBD | | 5 Unit | 61.668,915 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Pangkal Pinang | 5 Unit | 124.320 | APBD | | 5 Unit | 130.536 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Pangkal Pinang | 2 Unit | 199.950 | APBD | | 2 Unit | 209.947,5 |
| | Kegiatan : Penilaian SAKIP PD | | Pangkal Pinang | | 65.000 | APBD | | | 75.000 |

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Di samping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan 2022;
- 2) Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan 2022;
- 3) Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- 4) Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;
- 5) Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra Inspektorat Daerah 2023 - 2026 selama 4 (empat) tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencanakerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pangkalpinang, April 2022

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP.196306121985031001

